

Judul : Pro dan Kontra Perppu Cipta Kerja di Parlemen
Tanggal : Jumat, 13 Januari 2023
Surat Kabar : Hukum Online
Halaman : 14

Pro dan Kontra Perppu Cipta Kerja di Parlemen

Partai Demokrat dan PKS menolak Perppu Cipta Kerja, PDIP dan Golkar mendukung

**Vendy Yhulia Susanto,
Ratih Waseso Aji**

JAKARTA. Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terus memuat polemik. Beleid baru yang penuh pro dan kontra itu kini tinggal menunggu pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Bila DPR menolak, maka Perppu ini harus dicabut. Namun, jika disetujui, maka Perppu ini bisa langsung berjalan. Menjelang pembahasan di DPR, pro dan kontra dari fraksi partai politik (parpol) di parlemen kian menguat.

Penolakan datang dari parpol oposisi, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) me-

awal tetap konsisten menolak sejak masih berupa Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, bahkan hingga kini menjadi Perppu Cipta Kerja.

"Saya tegaskan kembali bahwa Partai Demokrat menolak dikeluarkannya Perppu Cipta Kerja," tegas AHY, Kamis (12/1).

Menurutnya, Perppu seharusnya hanya digunakan untuk keadaan genting dan memaksa. Sedangkan saat ini tidak ada keadaan genting dan memaksa, sehingga harus dikeluarkan Perppu tersebut.

Penolakan serupa juga diutarakan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidatyati. Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini, Perppu Cipta Kerja inkonsisten atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan perbaikan UU Cipta Kerja da-

lam waktu dua tahun, sejak ditetapkan inkonstitusional bersyarat pada 25 November 2021.

Ia juga mempertanyakan, penerbitan Perppu secara mendadak dan tidak ada hal yang dianggap mendesak.

Beri kepastian hukum

Sikap berbeda datang dari partai politik pengusung pemerintah. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mendukung terbitnya Perppu Cipta Kerja.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi ancaman krisis ekonomi global dan krisis energi. Sebab itu, PDIP memahami urgensi penerbitan Perppu Cipta Kerja.

Kendati begitu, PDIP juga turut memberi catatan kritis terhadap suatu kebijakan

yang dirasa kurang baik.

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai, langkah pemerintah menerbitkan Perppu Cipta Kerja sudah tepat. Menurutnya, pener-

bitan Perppu diambil pemerintah untuk mengantisipasi perekonomian yang penuh ketidakpastian. "Masyarakat dan pengusaha butuh kepastian hukum," ucapnya. ■

MK Terima Dua Gugatan

PERATURAN Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang diterbitkan pemerintah pada akhir tahun lalu kembali dipersoalkan di jalur hukum. Perppu tersebut resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Jurn Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, MK secara hukum berwenang menguji Perppu apabila ada gugatan terhadap Perppu tersebut. "Hingga saat ini sudah ada dua permohonan gugatan *judicial review* Perppu Cipta Kerja dan sudah diregistrasi," ujar Fajar, Kamis (12/1).

Adapun kedua pemohon *judicial review* tersebut adalah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), serta ada enam pemohon dari masyarakat yang mengajukan pengujian formil Perppu Cipta Kerja. Dua gugatan tersebut telah teregistrasi pada 11 Januari 2023. ■